



PROFESIONAL, INSPEKTORAT SEGERA LIMPALKAN KE WALIKOTA

Dewan 'Endus' Dugaan Gratifikasi Jasa Keamanan Balaikota

YOGYA (KR) - Kalangan DPRD Kota Yogya mengendus adanya dugaan gratifikasi dalam pengadaan jasa keamanan di Balaikota yang melibatkan oknum pejabat. Dugaan itu semakin kuat lantaran kasus tersebut ternyata telah ditangani oleh Inspektorat Kota Yogya.

Anggota DPRD Kota Yogya dari Fraksi PDI Perjuangan Antonius Fokki Ardiyanto, mengungkapkan dirinya sempat mendapatkan aduan dari salah satu warga Kota Yogya yang diberhentikan dari pekerjaannya sebagai tenaga pengamanan Balaikota. "Pemecatan dilakukan pada Maret kemarin, seharusnya karena tenaga alih daya maka pada Desember 2022 kemarin sudah tanda tangan kontrak selama setahun. Setelah kita telusuri, ternyata ada pu-

luhan orang yang mengalami kasus serupa," tandasnya, Jumat (19/5). Kondisi itu cukup menarik perhatian untuk didalami lebih lanjut. Hasilnya, imbuh Fokki, dirinya menemukan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pejabat. Sebelumnya oknum tersebut menduduki jabatan di Sat Pol PP Kota Yogya namun saat ini dimutasi di tempat lain seiring pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat. "Modusnya, oknum pejabat itu meminta sejumlah uang

agar bisa bekerja sebagai tenaga pengamanan di Balaikota guna menggantikan yang diputus sepihak melalui jasa pihak ketiga. Kebanyakan mereka yang dimintai uang ialah yang ber KTP luar Kota Yogya," urainya.

Fokki berharap Inspektorat menyampaikan ke publik terkait hasil investigasi yang sudah dilakukan. Dirinya juga mendesak agar pihak yang diberhentikan sebagai jasa pengamanan turut dimintai keterangan guna semakin menguatkan dugaan sekaligus memastikan apakah hak-hak mereka sudah terpenuhi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Inspektorat Kota Yogya Fitri Paulina Andriani, membenarkan perihal pemeriksaan yang ia lakukan menyangkut salah satu

oknum ASN di Pemkot. Dirinya juga menegaskan Inspektorat bekerja secara profesional dengan mengacu pada prosedur atas setiap pengaduan. Bahkan aduan terkait dugaan gratifikasi itu sudah diterima sejak akhir tahun lalu dan langsung ditindaklanjuti. "Saat itu kami telah apakah masuk dalam kadar pengawasan atau tidak. Ternyata masuk sehingga kami tingkatkan ke pemeriksaan atau investigasi. Saat ini sudah tahap penyusunan laporan akhir dan akan segera kami limpahkan ke walikota," tandasnya.

Diharapkan bulan ini laporan hasil audit atas kasus tersebut sudah bisa diselesaikan. Selanjutnya penerapan sanksi menjadi kewenangan kepala daerah se-

laku pejabat pembina kepegawaian. Selain menangani kasus tersebut, saat ini

Inspektorat juga tengah melakukan investigasi aduan yang masuk kadar peng-

awasan. Hanya hal itu menjadi telaah internal di Inspektorat. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005